

Sejarah Budaya Partai Keadilan Sejahtera di Jepara Tahun 1999-2009

Umami Nur Lutfiyah¹, dan Alamsyah²

¹Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto SH, Kampus Tembalang Semarang – 50275
Email: vivianlp18@gmail.com

²Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto SH, Kampus Tembalang Semarang – 50275
Email: alamsyah.fib@live.undip.ac.id

Abstract

This article discusses about the development of the Prosperous Justice Party in Jepara with various dynamics. The party originally called the Justice Party in Jepara, was founded by former campus religious activists. Initially, this party became a cadre party that applied strict standards in the recruitment process through the training process of its members. In its journey, the party did not fully become a cadre party because it needed the support of voters from all people. This reconstruction of the party uses historical methods consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this article illustrate that the development of the Prosperous Justice Party in Jepara was initiated in 1999 under the name Justice Party. In 2003, this party became the Prosperous Justice Party which in 2004, this party in Jepara became one of the participants in the election by getting a seat in the election. In the 2009 elections, the party won two seats in parliament, although the number of votes decreased compared to the previous election. The Prosperous Justice Party is not only involved in politics but also in the economic, social and health sectors

Keywords: Justice Party, PKS, Election, Development, Jepara

1. Pendahuluan

Pada masa Orde Baru, Partai Islam di Jepara diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam pemilu tahun 1977, PPP memperoleh 44 kursi dari 100 kursi di legislatif. Pada tahun 1982, PPP mengalami peningkatan dengan memperoleh 49 kursi (Schiller, Jim, 1996: 207). Secara historis partai Islam di Jepara didukung oleh masyarakat. Pasca Orde Baru, di Jepara beberapa partai Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan (PK) pertama kali ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di Jepara pada pemilihan umum 7 Juni 1999. Hasil yang diperoleh partai ini sekitar 1.528 suara (1,36%). Pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, PK di Jepara tidak mampu mendapatkan suara yang dapat menjadikan kadernya duduk di lembaga legislatif atau DPRD Jepara (KPU, 2014: 3). Terhadap kondisi tersebut, partai ini melakukan pembenahan internal untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi pemilu tahun 2004 melalui strategi yang lebih cermat supaya dapat menjadi partai peserta pemilu sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU.

Pada tahun 2003 Partai Keadilan ini mendeklarasikan bahwa partai ini berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Muhtadi, Burhanudi, 2012: 35). Implementasi dari perubahan tersebut, maka PKS Jepara secara resmi menjadi partai baru sejak tahun 2004. Keberadaan PKS ini sejak saat itu disosialisasikan kepada masyarakat. Perubahan nama dari Partai Keadilan menjadi PKS menjadi bukti bahwa para elit politik berjuang keras agar PKS dapat bertahan dalam kontestasi politik nasional. Hal itu dibuktikan hasil dengan pemilu 2004 di Jepara, dimana PKS memperoleh 20.147 suara dan mendapatkan 1 kursi di parlemen. Pada pemilu 2009 PKS mendapatkan 2 kursi di

parlemen dengan perolehan 18.970 suara (Wawancara dengan Arofik, Nur Alim, dan Saifudin, Januari 2020).

Perolehan suara PKS tidak lepas dari kebijakan dan jargon politik. Partai ini memerankan diri sebagai partai Islam dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagai partai Islam, PKS tetap mengusung nilai-nilai Islam sebagai kehidupan politik di Indonesia. PKS menyebut dirinya sebagai “partai dakwah”. Adapun dalam mengusung program pemerintahan yang baik, PKS mendasarkan diri sebagai partai yang bersih dan jujur (Lili Romli, 2006: 76). Dua faktor ini yang menjadi daya tarik bagi pemilih Jepara untuk memilih PKS. Terlepas dari naiknya perolehan suara PKS, secara keseluruhan dukungan pemilih Islam terhadap partai Islam masih relatif sedikit.

Sebagaimana partai lainnya, PKS punya kepentingan yang sama, yaitu hadir di masyarakat dan berperan aktif dalam mendinamisasi masyarakat. Partai politik tidak bisa skeptis bahwa targetnya adalah massa. Dengan pola *halaqah* dan *daurah*, PKS ingin menampilkan kader terbaiknya untuk bersama-sama dalam kegiatan masyarakat. PKS menginginkan tercapainya dua hal sekaligus; *pertama*, simpati masyarakat; kedua, memenangkan pemilu. Yang pertama berhubungan dengan politik psikologis, bahwa PKS menginginkan simpati masyarakat Jepara yang religius. Dengan program-program tersebut, kehadiran PKS bisa diterima oleh masyarakat Jepara yang secara afiliasi kepartaian, telah didahului kehadiran PPP, Golkar, dan PDIP. PKS berkeyakinan bahwa program-program tersebut belum banyak dilakukan oleh partai-partai tersebut. Oleh karena artikel ini akan memotret perkembangan PKS di tingkat lokal Jepara dengan berbagai dinamika yang ada.

2. Metode

Dalam penelitian menggunakan metode sejarah kritis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman dari perjalanan Partai Keadilan hingga menjadi PKS di Jepara. Ada 4 (empat) tahapan yang digunakan dalam merekonstruksi perkembangan PKS ini yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, Gilbert J. 1947). Heuristik atau pengumpulan diperoleh dari dokumen tertulis dan sumber lisan baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari notulen rapat, dokumen PKS, majalah lokal Gelora Bumi Kartini, surat kabar, dan wawancara terhadap pelaku sejarah yang terlibat dalam perkembangan PKS. Sumber sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan hasil riset yang relevan dengan topik. Sumber tersebut diperoleh dari Arsip PKS Jepara, Perpustakaan daerah Jepara, sumber *online*, dan arsip pribadi. Setelah sumber ditemukan proses selanjutnya melakukan kritik untuk menguji otentisitas dan menguji kredibilitas sumber. Setelah dikritik, berbagai fakta tersebut diinterpretasi atau ditafsirkan supaya mempunyai hubungan yang logis dan kronologis. Tahap terakhir, historiografi yaitu kegiatan merekonstruksi peristiwa secara sistematis, logis, dan ilmiah tentang perkembangan PKS di Jepara.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Dari PK Jepara ke PKS Jepara

Berdirinya PKS Jepara diprakarsai oleh Saifuddin, Lc., Arofiq, ST., Nur Alim Thamrin, Lc., Chandiq Isminanto, Sugiyantoro, S.Pd., dan Ishaq. Mereka adalah alumni dari beberapa perguruan tinggi. Tokoh PKS pada awalnya merupakan para aktivis dakwah kampus yang sudah terbiasa berkecimpung dalam aktivitas keagamaan. Setelah lulus, para aktivis ini melanjutkan kegiatan dakwah di daerah masing-masing, salah satunya di Jepara. Para pendiri PKS Jepara melihat bahwa Islam di Indonesia sebagai kelompok mayoritas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan pembangunan, baik fisik maupun mental. Hal ini bisa dimulai dari sistematisasi gerakan melalui dibentuknya sebuah partai yang memiliki distingsi di tengah kancah perpolitikan (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020).

Pendirian PKS bermula dari Partai Keadilan. Pada tahun 1998, di Jepara terdapat kelompok pengajian (*halaqah*) yang diikuti oleh warga dengan berlatar belakang organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Lingkup pengajian ini masih kecil di tingkat kecamatan. Setelah mereka mendengar bahwa kelompok *halaqah* mendirikan partai politik di Jakarta, ada sebagian dari ormas NU dan Muhammadiyah yang *pro* dan *kontra*. Pada awalnya banyak yang tidak

berminat bergabung di Partai Keadilan sehingga jumlah kadernya sedikit, hanya belasan orang saja. Dalam perjalanannya, berkat kegigihan, keuletan, serta kebersamaan para kader, akhirnya Partai Keadilan terbentuk di Jepara (Wawancara dengan Nur Alim, Januari 2020).

Pada tahun 2003, Partai Keadilan Jepara mengirim perwakilan dalam acara deklarasi PKS yang diselenggarakan di Lapangan Monas Jakarta tanggal 20 Mei 2003. Perwakilan tersebut adalah Saifuddin, Arofiq, Giyantoro dan Nur Alim Thamrin. Pasca ikut deklarasi PKS pusat di Jakarta, sejumlah tokoh lokal Jepara membuat dan mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk membentuk dan mendaftarkan partai agar dapat menjadi peserta pemilu tahun 2004

Pembentukan partai lokal Jepara, termasuk PKS dilakukan melalui proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jepara. Adapun syarat untuk lolos verifikasi menjadi partai peserta pemilu, yaitu harus mengumpulkan 1000 (seribu) KTP lengkap dengan kartu anggota. Pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu anggota partai disertai dengan pernyataan bahwa orang tersebut merupakan anggota PKS (simpatisan) serta bukan anggota partai lain. Dalam proses verifikasi ini PKS berhasil mengumpulkan 3000 KTP lengkap dengan kartu anggota. Akhirnya PKS lolos verifikasi persyaratan untuk membentuk partai lokal Jepara lengkap dengan kepengurusan kader inti. Setelah persyaratan tercukupi, KPU melakukan verifikasi kepada masyarakat Jepara terhadap eksistensi dukungan terhadap PKS (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020).

Perubahan Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanyalah perubahan nama agar dapat mengikuti pemilu 2004. Oleh karena itu secara suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS (jaringan kader, kepengurusan dan aset-aset partai) merupakan limpahan dari Partai Keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum 1999, bab VII pasal 39 mengenai syarat keikutsertaan dalam pemilu berikutnya adalah mengharuskan Partai Keadilan membentuk partai baru atau berganti nama. Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera dalam siaran pers No.01/sp/DPP-PKS/VI/1424 menjelaskan tentang penggabungan struktur DPP Partai Keadilan dan PKS. Penggabungan ini merupakan amanat dari Musyawarah Nasional (Munas) istimewa Partai Keadilan dan Musyawarah Nasional 1 (Munas) PKS, yang berlangsung pada 18-20 April 2003, di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. Implementasi dari Munas tersebut di daerah termasuk di Jepara dibentuk Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan perubahan dari Partai Keadilan.

3.2. Perkembangan PKS di Jepara

Sebagai partai kader, PKS di Jepara memiliki sistem kaderisasi yang sistematis dan metodik. Pengkaderannya terdiri dari tiga jenis, yakni pengkaderan melalui Tarbiyah, pengkaderan oleh *underbow* PKS, dan pengkaderan formal kepartaian. Pengkaderan Tarbiyah berintikan pada pembinaan berbasis kelompok kecil (*usroh/halaqah*) di bawah seorang *murabbi*. Pengkaderan oleh *underbow* PKS seperti Gada Keadilan (GK), Salimah, Serikat Pekerja Keadilan (SPK), Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengembangkan pola dan model pengkaderan sendiri-sendiri. Adapun pengkaderan formal kepartaian dilakukan secara resmi oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) hingga kepengurusan partai dari Dewan Pengurus Ranting (DPRa) (Rahmat, Imadadun, 2008: 238). Pada tahun 2003 kaderisasi yang dilakukan PKS Jepara tidak berbeda dengan kaderisasi yang ada di tingkat pusat. Sistem pengkaderan dan pola kaderisasi di DPD PKS Jepara mengikuti acuan dan arahan dari pusat karena PKS merupakan partai sentralistik (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020).

Kaderisasi formal yang dilakukan PKS berdasarkan kombinasi dari dua model hierarki dan spesialisasi/keahlian. Model ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan fungsi-fungsi partai yang akan dijalankan dalam struktur organisasi partai. Model hirarkhi adalah perjenjangan kaderisasi berdasarkan pelapisan yang bertahap dengan berdasarkan pada peraturan yang ada dalam AD/ART PKS. Tahapan itu terdiri dari Anggota Pemula, Anggota Muda, Anggota Madya, Anggota Dewasa, Anggota Ahli dan Anggota Purna. Masing-masing jenjang melakukan tahapan materi kaderisasi sesuai jenjang kader. Adapun model spesialisasi/keahlian didasarkan pada fungsi pengelolaan partai yang membutuhkan keahlian khusus sehingga lebih menonjolkan sisi keahlian tertentu yang harus dimiliki kader partai.

Metode yang digunakan PKS dalam proses rekrutmen yaitu menggunakan metode rekrutmen individual dan metode rekrutmen institusional. *Pertama*, metode rekrutmen individual (dakwah

fardhiyah) dijalankan dengan bentuk pendekatan personal secara langsung kepada orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi kader. *Kedua*, metode rekrutmen institusional (*dakwah al-'amma*) melibatkan struktur formal kepartaian maupun organisasi-organisasi afiliasi PKS. Pola rekrutmen ini memanfaatkan institusi keagamaan dan institusi pendidikan seperti sekolah ataupun Perguruan Tinggi. Para calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam serangkaian forum dan kegiatan yang diorganisir oleh PKS. Kegiatan-kegiatan tersebut diorganisir secara *continue* agar para anggota memiliki nilai dan pemahaman yang sama (Tim Kaderisasi DPP PK-Sejahtera, 2004: 35).

Selanjutnya program kerja DPD PKS Jepara pada tahun 2004-2009 yaitu mengadakan rapat rutin dengan pengurus harian. Rapat pengurus partai dilakukan setiap bulan sekali di kantor DPD PKS Jepara. Jika memerlukan pembahasan yang mendesak, maka diadakan pertemuan lebih dari satu kali meskipun belum satu bulan. Program yang lain adalah rapat kerja (*raker*) yang diikuti DPC dan DPRa seluruh Jepara. Kegiatan ini diselenggarakan setahun sekali. DPD PKS melakukan beberapa kegiatan setiap pekan, bulan, dan tahun. Kegiatan rutin yang dilakukan berupa *Ta'lim* Rutin Partai (TRP). Kegiatan lain yang dilakukan setiap tahun adalah Mukhayam Pandu Keadilan. Adapun aktivitas *halaqah* dan *tatsqif* merupakan kewajiban dilakukan setiap pekan. Kegiatan *daurah*, *ta'lim*, *mabit*, dan *rihlah* merupakan kewajiban bulanan. (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020)

3.3. Kiprah PKS di Jepara

Pada pemilu 2004, perjuangan kader PKS mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Tercatat, PKS menempati urutan ke-7 (tujuh) dalam perolehan suara dan berhasil meraih satu kursi di DPRD Jepara. Satu-satunya kader PKS yang berhasil menduduki kursi tersebut adalah Saifuddin, Lc. Strategi menghadirkan profil PKS yang lebih terbuka kembali membuahkan hasil. Pada pemilu tahun 2009, PKS Jepara menempati urutan ke-10 (sepuluh). Meskipun turun peringkat, namun perolehan suaranya mencapai 18.970 suara dan berhasil mengirim wakil di DPRD Jepara dua kader, yaitu Saifuddin dan Arofiq. Meskipun hanya memperoleh dua kursi dari total 50 kursi yang tersedia, PKS telah memberikan kontribusi di legislatif ini. (Gelora Bumi Kartini, 2009: 10)

Bertambahnya jumlah kader PKS sebagai anggota DPRD, menambah kekuatan dan daya tawar PKS di DPRD. Kader PKS memainkan peran cukup baik dalam setiap pengambilan keputusan. Di antaranya adalah upaya penegakan Perda Penataan Ruang berbasis pada keanggotaan di level terkecil. Kader PKS menilai, pembangunan infrastruktur akan berjalan efektif ketika memperhatikan asas keadilan. Keadilan di sini dimaksudkan agar pada setiap pembangunan infrastruktur, misalnya penataan ruang, pemerintah harus melakukan kajian mendalam untuk mengetahui kebutuhan secara pasti. Di sinilah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang baik akan berkontribusi untuk menyukseskan program pemerintah. Inilah aspirasi yang sering disuarakan oleh kader PKS di DPRD. Selain persoalan tata ruang, PKS juga mengkritisi realisasi belanja APBD yang tidak tepat waktu, termasuk penyerapan anggaran yang belum maksimal. PKS juga melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya dalam upaya melakukan kontrol dalam hal penegakan hukum di masyarakat. (Wawancara dengan Arofiq, Januari 2020)

Kiprah lainnya adalah memperjuangkan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru-guru swasta. PKS bersama dengan anggota legislatif yang lain ikut mendorong pemerintah Jepara agar memberikan kepastian regulasi yang mengatur kesejahteraan para guru swasta.

Dalam bidang politik, PKS memberikan kontribusinya dalam bentuk kegiatan Seminar Kebangsaan yang diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan sekali di gedung PGRI Kecamatan Jepara dan di gedung serba guna yang ada di Kecamatan Kalinyamatan. Acara tersebut dihadiri peserta 100 orang tanpa dipungut biaya.

PKS Jepara memberikan kontribusinya dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK IT) Permata Insani Jamil dan Sekolah dasar Islam Terpadu (SD IT) Amal Insani. Pendirian lembaga pendidikan ini merupakan salah satu kontribusi untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa terutama di Jepara. (Wawancara dengan Saifuddin, Januari 2020)

Di bidang sosial, fokus kiprah PKS pada Yayasan Panti Asuhan Bina Insani yang berada di Kesa Bandengan Kecamatan Jepara. Yayasan Bina Insani berdiri sejak tahun 2006 yang bertujuan membina anak-anak kurang mampu dan anak yatim piatu.

Para kader partai memahami bahwa semua masyarakat menginginkan kesejahteraan atau kemapanan secara ekonomi. Partai menekankan bahwa kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh PKS dengan menyelenggarakan bakti sosial dalam bentuk cek kesehatan gratis seperti donor darah, tensi darah, cek asam urat, dan gula darah. (Wawancara dengan Dirman, April 2020)

4. Simpulan

PKS sebagai partai yang muncul pasca reformasi merupakan organisasi yang ingin membangun transparan, akuntabel, rapi, dan egaliter. Secara organisatoris, PKS memiliki *blue print* kaderisasi berjenjang dengan pola tarbiyah, mulai dari *halaqah/liqa*, *daurah*, dan mukhayyam. Metode ini tepat untuk menghasilkan kader yang militan terhadap partai. Salah satu kelebihan PKS adalah sisi egalitarianisme, di mana PKS tidak memiliki figur sentral yang memiliki pengaruh absolut. Ini berbeda dengan partai politik pada umumnya yang hanya didominasi oleh figur atau kelompok tertentu. Jika pada partai politik lainnya, muncul faksi berbasis perbedaan kepentingan dan pengaruh, PKS tidak menghadapi problem tersebut. Semua kader punya peluang yang sama. Profil awal PKS ini disinyalir menjadi magnet bagi PKS di Jepara.

Perkembangan PKS di Jepara cukup lambat karena kuatnya pengaruh partai Islam yang lain yang ada kesan didukung oleh ormas Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kesulitan PKS di Jepara dipengaruhi oleh isu politik global tentang gerakan transnasional. Migrasi ideologi Wahabi dan Salafi dari Timur Tengah ke Indonesia secara masif, menempatkan PKS yang kadang dipersepsikan sebagai partai politik yang identik dengan gerakan tersebut.

Referensi

- Arsip PKS. 2020. Siaran Pers No. 01/SP/DPP-PKS/V/1424 tentang Penggabungan Struktur DPP Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera: Penjaringan Calon Presiden Berbasis Kader dan Masyarakat (Jaringan Capres Emas): Dan Perkembangan Terakhir Seputar Kebohongan Publik Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Inggris atas Iraq, Jakarta, 20 Juli 2003.
- Garraghan, Gilbert J. 1947. *A guide to historical method*. New York: Fordham University Press
- Gelora Bumi Kartini. 2009. "Anggota DPRD Dituntut Hati-Hati Dan Cermat". Edisi Oktober.
- Muhtadi, Burhanuddin. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia.
- Komisi Pemilihan Umum Jepara. 2004. *Hasil partai politik tahun 1999 dan 2004*. Jepara: KPU
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Rahmat, Imadadun. 2008. *Ideologi politik PKS Dari Masjid Kampus Ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Schiller, Jim. 1996. *Developing Jepara in New Order Indonesia*. Australia: Monash Asia Institute.
- Tim Kaderisasi DPP PK-Sejahtera. 2009. *Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media dan DPP PK Sejahtera
- Wawancara dengan Arofiq. 17 Januari 2020.
- Wawancara dengan Dirman Sudirman. 28 April 2020.
- Wawancara dengan Nur Alim Thamrin. 23 Januari 2020.
- Wawancara dengan Saifuddin. 20 Januari 2020.